



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS UDAYANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I GUSTI BAGUS WIKSUANA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 446503

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.185.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 327 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 400000 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 100000 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 267.800.000

1. MOTOR, MOTOR LISTRIK SIGESIT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.800.000
3. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.104.202.067
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.562.002.067
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.562.002.067

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.